



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Agustus 2024/Khusus - Calon PN)

### Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)

UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

#### I. DATA PRIBADI

1. Nama : M FAJAR ALDILA
2. Jabatan : CALON WAKIL BUPATI
3. NHK : 967475

#### II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 3.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 3.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	438.900.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 398.900.000		
2. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.163.642.068
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.102.542.068</b>
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.102.542.068

#### Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.